

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thesis ini akan menganalisis dan membahas tentang keberhasilan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan investasi asing di daerahnya. Dalam thesis ini akan ditampilkan data-data tentang peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dari data yang diperoleh akan di analisis mengenai factor-faktor yang mendukung keberhasilan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan investasi asing di daerah tersebut. Selain itu juga akan di analisis tentang factor-faktor pendukung investasi asing yang selama ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam era globalisasi ini, kerjasama merupakan keharusan bagi berbagai pihak untuk mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral. Hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan dalam suatu hubungan internasional menjadi lebih berkembang dimana perkembangannya merupakan hasil akibat dari adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dari bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan regional, nasional, maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar Negara, kemajuan teknologi komunikasi telah

mendorong pengaruh globalisasi semakin meluas bagi para pelaku hubungan internasional tidak hanya pada aktor Negara saja.

Investasi asing menjadi hal yang sangat penting bagi suatu Negara ataupun daerah untuk menjalankan dan menumbuhkan perekonomiann di daerahnya. Bagi pemerintah daerah Investasi menjadi upaya pemerintah di tingkat daerah untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negaraasing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hokum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Terdapat dua bentuk penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Pertama adalah penanaman modal asing dengan investasi langsung, dan yang kedua adalah penanaman modal asing dengan bentuk investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung ini berupa porto folio, yaitu pasar modal melalui bursa efek dengan surat berharga, seperti saham dan obligai serta kredit impor.¹

Sedangkan investasi langsung atau sering disebut *FDI* adalah investasi yang dilakukan untuk memperoleh minat atau kontrol yang efektif yang

¹ Siddik Jatmika. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif hubungan Internasional. Yogyakarta. BIGRAF publishing.

berlangsung lebih dari sebuah perusahaan yang beroperasi di luar perekonomian investor.² FDI juga didefinisikan sebagai investasi lintas batas oleh entitas penduduk dalam satu ekonomi dengan tujuan memperoleh bunga abadi dalam penduduk perusahaan dalam ekonomi lain. Kepentingan abadi menunjukkan keberadaan hubungan jangka panjang antara investor langsung dan perusahaan serta tingkat signifikan pengaruh oleh investor langsung pada manajemen perusahaan. Pemilikan paling sedikit 10% dari hak suara, yang mewakili pengaruh oleh investor, adalah kriteria dasar yang digunakan.³

Penanaman modal atau investasi asing sangat mempengaruhi berjalan dan berkembangnya perekonomian di suatu wilayah. Paul Krugman menjelaskan bahwa pertumbuhan angka perekonomian yang terjadi di kawasan Asia sebenarnya di picu dan di dorong oleh penanaman modal asing yang masuk di kawasan Asia.⁴ Negara-negara yang sedang berkembang biasanya memiliki kesulitan dalam memperoleh modal pembangun. Maka dari itu, penanaman modal asing sangat berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian di suatu Negara, khususnya bagi Negara berkembang.

Bagi suatu Negara, penanaman modal asing tersebut juga sangat penting karena berfungsi sebagai tabungan suatu Negara yang berfungsi sebagai sumber

² PBB, oktober 2007, Indikator Pembangunan Berkelanjutan: Pedoman dan Metodologi, New York, Dicitak oleh PBB, New York. Dikutip dari http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/global_econ_partnership/fdi.pdf&prev=search

³ OECD Factbook 2013: Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Statistik cabang Globalisasi dalam <http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2013-34-en>

⁴ Paul Krugman, Majalah SWA, 05/XIV/5-18 maret 1998 dikutip dari Siddik Jatmika. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif hubungan Internasional. Yogyakarta. BIGRAF publishing.

modal. Karena tabungan tersebut nantinya bisa dipergunakan oleh Negara sebagai penanaman modal. Dengan kata lain, penanaman modal yang tinggi, akan meningkatkan tabungan yang tinggi bagi suatu Negara.⁵

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.⁶ Di Daerah istimewa Yogyakarta, investasi asing menjadi salah satu hal yang penting dalam menopang perekonomian di daerah. Maka dari itu pada beberapa tahun terakhir peluang investasi terbuka lebar bagi para investor.

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi

⁵ Siddik Jatmika. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif hubungan Internasional. Yogyakarta. BIGRAF publishing.

⁶ JOGJAINVEST BKPM, Tentang BKPM dalam <http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/tentang-bkpm>

dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah (pemda) mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah

Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.⁷ Di Daerah istimewa Yogyakarta, investasi asing menjadi salah satu hal yang penting dalam menopang perekonomian di daerah. Maka dari itu pada beberapa tahun terakhir peluang investasi terbuka lebar bagi para investor.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang telah menjadikan investasi asing dalam pertumbuhan perekonomiannya. Investasi asing dijadikan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penopang berjalannya perekonomian daerah. Daerah istimewa Yogyakarta bukan merupakan salah satu daerah industry dan metropolitan di Indonesia, namun Daerah istimewa Yogyakarta tetap berusaha menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai macam

⁷ JOGJAINVEST BKPM, Tentang BKPM dalam <http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/tentang-bkpm>

kendala dan hambatan menjadi tantangan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan investasi asing di daerah. Beberapa hambatan dan kendala tersebut merupakan faktor utama yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal. Mulai dari masalah sumber daya manusia hingga masalah ketersediaan infrastruktur yang sangat menunjang bagi berjalannya sebuah usaha atau industry. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dimiliki pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya :

1. Sumber daya manusia

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ketersediaan tenaga kerja tergolong cukup memenuhi berjalannya perekonomian. Namun, jumlah tenaga kerja tersebut berada pada bidang pertanian khususnya dalam bidang pertanian tradisional yang tingkat produktivitasnya tergolong rendah, dibandingkan dengan tenaga kerja yang masuk kedalam bidang non pertanian. Padahal pada sektor industri dan jasa dibutuhkan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi kriteria dalam tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan demikian, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian

yang tinggi, dibutuhkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sebagai tenaga kerja yang profesional.⁸

Tabel 1.1 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014(Feb)	Perubahan
1	≤ SD	785.064	601.552	(183.512)
2	SMTP	409.859	356.653	(53.206)
3	SMTA Umum	577.871	737.945	(160.074)
4	Diploma I/II/III/Akademi	95.459	85.893	(9.566)
5	Universitas	131.481	250.853	(119.372)
TOTAL		1.999.734	2.032.896	33.162

S u m b e r : B P S , 2 0 1 4

2. Sarana dan Prasarana

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar di daerah Yogyakarta belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Yogyakarta, diperlukan sistem transportasi perkotaan dan sistem transportasi perdesaan yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar.

⁸ PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dalam www.bappenas.go.id/.../bab-47-bag-12-94-95__20090130075035__11...

Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara yang memadai. Di pihak lain, ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya air bersih dan tenaga listrik agar investasi Sating pariwisata dapat berkembang, serta sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.⁹

Di Sating transportasi udara, Bandara Adisutjipto yang telah menjadi bandara internasional sejak 2004 menjadi pintu masuk transportasi udara bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Sating8e maupun internasional. Keterbatasan fasilitas sisi udara dan darat yang berada di Bandara Adisutjipto menyebabkan fungsi Bandara Adisutjipto sebagai gerbang wilayah selatan Pulau Jawa tidak dapat optimal. Status bandara yang enclave civil menyebabkan landas pacu yang ada dimanfaatkan untuk dua kepentingan yakni penerbangan sipil dan latihan terbang militer. Tidak adanya *Taxiway* Paralel membuat panjang landas pacu yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kenyamanan dan keamanan operasi penerbangan terganggu.¹⁰

⁹PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dalam www.bappenas.go.id/.../bab-47-bag-12-94-95__20090130075035__11...

¹⁰ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013Di kutip dari http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/RPJMD_DIY_2009-2013.pdf

3. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana yang memiliki peran tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah yang tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia. Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja (pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta).¹¹

4. Pengendalian Jumlah Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan dan kondisi ekonomi yang cukup baik menyebabkan cepatnya pembangunan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan ini menimbulkan kurang terkendalinya pembangunan dan pengembangan di beberapa kawasan yang berakibat menurunnya mutu pelayanan kota dan citra kota, khususnya di wilayah perkotaan Yogyakarta. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, terutama penduduk perkotaan, sekaligus mengendalikan pembangunan dan pengembangan kota agar mutu

¹¹ Perkembangan Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta 2014 dikutip dari perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/157872-%5B

pelayanan kota makin baik dan efisien, serta terciptanya citra kota yang baik, lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman.¹²

5. Masalah Koordinasi

Belum mantapnya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.¹³

6. Bencana Alam

Keadaan geografis Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya memberi sisi positif bagi pembangunan. Namun, keberadaan gunung merapi sebagai gunung teraktif di dunia memberikan ancaman yang kapan saja bisa melanda kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, bencana gempa bumi juga kapan saja bisa melanda Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Dengan adanya beberapa kawasan bencana juga menjadi kendala bagi rencana pembangunan daerah.

7. Masalah keamanan

Keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari sisi kriminalitas dan kerawanan 10ating. Kasus pencurian, terutama kendaraan bermotor dan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kriminalitas yang meresahkan

¹² PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dalam www.bappenas.go.id/.../bab-47-bag-12-94-95__20090130075035__11...

¹³ *Ibid*

masyarakat. Kedua kasus tersebut jumlahnya cukup besar, bahkan untuk kasus penyalahgunaan narkoba mengalami kecenderungan meningkat.

Banyak hal yang memicu peningkatan tindak kriminalitas di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya motif dan modus kejahatan, hingga menurunnya sistem l1ating11 l1ating di masyarakat. Bahkan untuk kasus cyber crime, telah memberikan sumbangan l1ating11e bagi citra DIY sebagai wilayah yang nyaman bagi cyber crime. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, kecenderungan tindak kriminalitas dan kerawanan l1ating di masa l1ating akan semakin meningkat.¹⁴

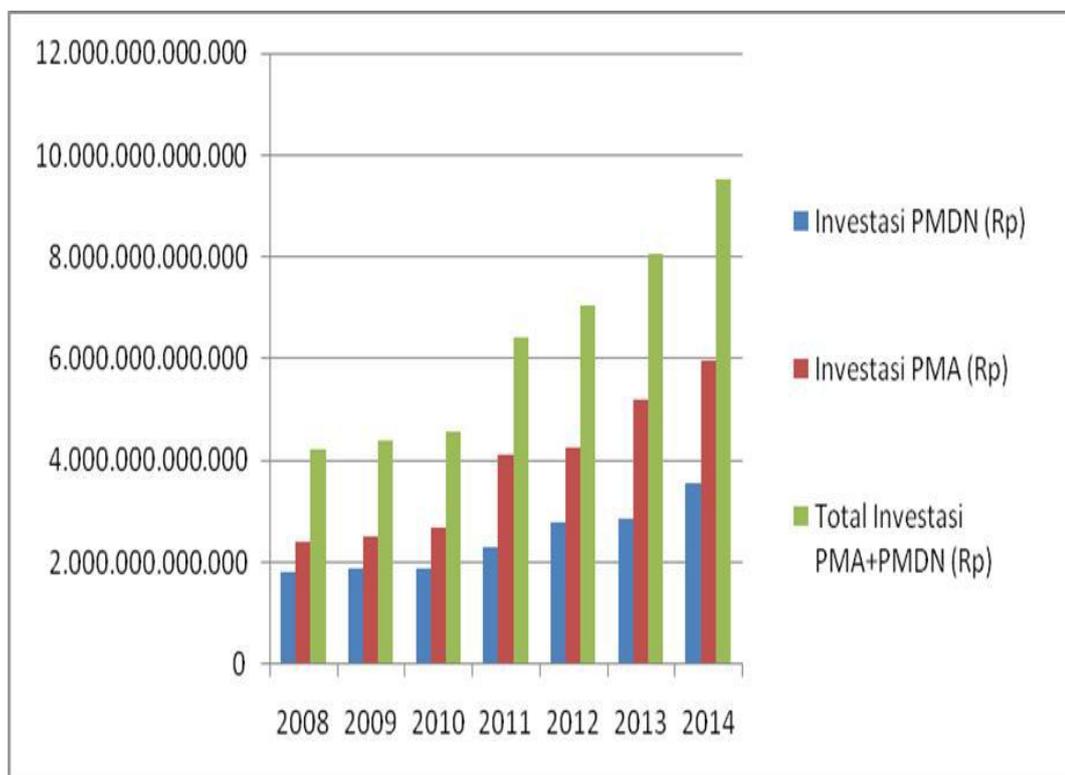
Yogyakarta sebagai suatu daerah yang telah menjadikan investasi asing dalam pertumbuhan perekonomiannya, termasuk salah satu daerah di Indonesia yang cukup berhasil dalam penataan kebijakan investasi asing. Meskipun bukan sebagai salah satu daerah industry dan metropolitan, namun Daerah istimewa Yogyakarta tetap berhasil menarik para investor asing untuk menanamkam modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor asing. Keberhasilan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan angka investasi asing di daerah terlihat dari semakin meningkatnya jumlah investasi asing yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenaikan jumlah investasi asing yang

¹⁴ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013Di kutip dari http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/RPJMD_DIY_2009-2013.pdf

masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2008 ini lebih tinggi angkanya jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan semakin meningkatnya angka investasi asing yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penataan kebijakan investasi asing.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Investasi Asing di

Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : BKPM Provinsi DIY 2015

Peningkatan angka investasi asing yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2008 termasuk berhasil jika dibandingkan dengan jumlah

angka inestasi asing pada periode-periode sebelumnya. Hal ini juga terlihat belum maksimalnya angka peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah angka peningkatan investasi asing yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode sebelum 2008 masih terlihat belum menunjukkan angka keberhasilan. Dimana masih rendahnya angka investasi asing yang masuk ke daerah.

Disamping peningkatan yang cukup tinggi pada peride 2008-2014, keberhasilan realisasi investasi asing juga terjadi pada tahun 2015. Dengan target realisasi investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing berhasil di capai hanya dari sector penanaman modal asing. Dimana target investasi gabungan (PMDN dan PMA) yang harus dicapai Rp 10.467.183.000.000. Realisasi investasi penanaman modal asing mencapai 89,11 juta US\$.

Tabel 1.2 Investasi Asing

Target Investasi Tahun 2015	Realisasi Investasi Tahun 2015
10.467.183.000.000	89,11 juta US\$ (Rp11.584.300.000)

Sumber : BKPM

Tabel 1.3 Realisasi Investasi

Nilai Realisasi Investasi Tahun	PMDN (Rp juta)	<i>Tumbuh</i> (%)	PMA (Rp juta)	<i>Tumbuh</i> (%)
2003	2.405.275	22,61	1.330.333	35,64
2004	2.401.967	(0,14)	1.507.781	13,34
2005	2.251.067	(6,28)	1.945.218	29,01
2006	2.144.879	(4,72)	1.905.619	(2,04)
2007	1.801.534	(16,01)	2.299.446	20,67
2008	1.806.426	0,27	2.415.461	5,05

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka, 2004-2008

Selain itu, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mewujudkan bahwa Yogyakarta telah terpilih sebagai kota yang paling mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Peringkat ini sebagai hasil dari laporan Bank Dunia dan IFC (International Finance Corporation) yang diterbitkan pada bulan Februari 2012. Laporan tersebut berdasarkan suatu survei di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di daerah yang dilakukan di 20 kota terkemuka untuk berbisnis di Indonesia, yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Batam, Balikpapan, Denpasar, Makassar dan Manado.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi asing di tingkat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan factor pendukung dan penghambat dalam kegiatan investasi asing yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
4. Menerapkan teori yang selama ini di peroleh di bangku kuliah dan menungkannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. KONTRIBUSI

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni :

1. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah daerah dan perusahaan asing sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat melihat peluang dan tantangan investasi asing sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan,

pertukaran informasi, kerjasama dan memorandum of understanding diantara berbagai pihak.

2. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian investasi asing sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan berbagai pihak lain diberbagai negara di dunia.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Mengapa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil dalam meningkatkan investasi asing di daerahnya?

E. STUDI PUSTAKA

Dalam era globalisasi seperti ini, perubahan sistem politik internasional telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih berkembang. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong pengaruh globalisasi semakin meluas bagi para pelaku hubungan internasional tidak hanya pada aktor Negara saja. Proses globalisasi dan integrasi regional menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam perkembangan peranan Pemerintah Sub-Nasional di berbagai Negara. Pada dasarnya pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun seiring dengan perkembangan undang-undang yang bertujuan untuk

mewujudkan mekanisme dan koordinasi yang sesuai dalam hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma kerjasama luar negeri melalui undang-undang otonomi daerah, mewujudkan terciptanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah (pemda) mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan kebijakan diformulasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam era otonomi daerah, dimana pemerintah daerah di tuntut untuk mandiri dalam mengurus kebijakan di daerahnya, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan dalam pembangunan ekonomi di daerahnya. Lincolon Arsyad (2000) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa peranan penting yang bisa di ambil oleh pemerintah daerah dalam proses pemabangunan ekonomi di daerahnya. Diantaranya adalah sebagai entrepreneur, coordinator, fasilitator dan stimulator dalam rangka untuk inisiatif dan inovasi dalam pembangunan daerah. Harrod domar menjelaskan bahwa ada hubungan yang berbanding lurus antara pertumbuhan perekonomian di daerah dengan tingkat investasi di daerah. Di jelaskan bahwa apabila invesatasi di suatu daerah kurang, maka akan mengakibatkan pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut juga rendah. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi tingkat investasi di suatu daerah yang tinggi, maka akan mengakibatkan tingginya tingkat pendapatan perkapita di daerah tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai kasus-kasus investasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. dalam beberapa penelitian tersebut muncul beberapa temuan-temuan mengenai investasi dan beberapa factor yang memengaruhi tingginya investasi asing di daerah. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Djoko Santoso, Nunik, Hardani dan Iswoyo mengenai *Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi Di Kota Semarang* pasca diberlakukannya otonomi di daerah pada tahun 2001. Mereka berpendapat bahwa ada hubungan antara peraturan daerah, tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut mengidentifikasi dan menganalisis produk hukum Kota Semarang yang berkaitan dengan investasi. Mereka berpendapat bahwa Keberhasilan daerah dalam upaya untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. mereka berpendapat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang setelah era otonomi daerah sering mengalami tumpang tindih dengan pemerintah pusat, khususnya dalam kewenangan masalah pajak.

Nisa Shifa Rahimah dan Heru Purboyo Hidayat Putro, juga melakukan penelitian dalam jurnalnya *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat* yang dilakukan pada tahun 2007 hingga 2011. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Analisis yang dilakukan adalah melihat

perkembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadi peningkatan perkembangan infrastruktur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Keberadaan investasi asing dan dalam negeri cenderung berada di daerah perkotaan atau daerah yang cukup maju secara ekonomi. Kemudian beberapa sector juga terdapat di daerah perkotaan namun terdapat juga daerah perdesaan. Ada pula sector yang mengalami pemusatan distribusi di daerah-daerah yang merupakan pusat pertumbuhan. Adanya infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif untuk perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan. di simpulkan bahwa investasi memiliki kecenderungan berada di daerah-daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dominasi pada kegiatan industri. Namun Investasi juga menyebar mengikuti adanya fasilitas yang memadai di suatu daerah.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Ikhsan setiawan, agus dan satirianingrum dalam jurnalnya yang berjudul *Linier Trend Analysis Dampak Peningkatan Investasi Di Daerah Terhadap Pengembangan Property Komersial*. Mereka melakukan penelitian di tiga kota besar di Indonesia di antaranya adalah Makasar, Provinsi Banten dan kota Bandung. Dalam penelitian tersebut di ungkapkan bahwa tingginya investasi di tiga daerah tersebut didukung oleh adanya infrastruktur dan lokasi strategis yang menjadi daya tarik bagi investor.

Dalam buku yang berjudul *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan* yang ditulis oleh H. Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc. Dalam buku tersebut terdapat sebuah tulisan mengenai investasi asing yang masuk ke kota Batam. Dalam buku tersebut diungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Investasi asing yang masuk ke Kota Batam mulai dari tahun 1992 hingga tahun 2006. Dalam buku tersebut diungkapkan keunggulan atau daya tarik Kota Batam menjadi tujuan bagi para investor hingga menciptakan peningkatan jumlah investasi asing yang masuk ke kota tersebut. Factor pendukung dari peningkatan angka investasi asing adalah lokasi geografis yang strategis Kota Batam yang sangat berdekatan dengan Singapura dan Malaysia hingga menjadikan potensi masuknya investasi asing langsung. Kemudian adanya peraturan pemerintah PP No. 46 tahun 2007 yang menetapkan Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi asing di Kota Batam di pengaruhi oleh lokasi yang strategis serta peraturan atau kebijakan yang mendukung masuknya investasi asing berupa PP No. 46 tahun 2007.¹⁵

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Keagenan (Agency theory)

Teori agency merupakan teori yang umumnya digunakan dalam bidang perekonomian. Namun teori keagenan dapat pula diimplementasikan dalam bidang pemerintahan. Teori agensi menurut Jensen dan Meckling merupakan

¹⁵ H. Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc.,2015, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan*, Yogyakarta, deepublish punlisher

hubungan kontrak antara orang atau beberapa orang yang disebut principal dengan agent. Dimana principal memberikan kewenangan kepada agent untuk melakukan sebuah wewenang dengan membuat kebijakan demi kepentingan principal. Termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal atau masyarakat kepada agent¹⁶. Pemerintah dapat dianggap sebagai agent di sebuah negara atau wilayah pemerintah daerah, yang oleh masyarakat di beri kewenangan untuk mememutuskan keijakan demi kepentingan masyarakat.

Menurut Alan M Rugman, terdapat dua factor penting yang mempengaruhi penanaman modal asing masuk kedalam sebuah negara., yaitu variable lingkungan dan variable internalisasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah.. Dalam investasi asing, pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam mempengaruhi keberdaan investasi asing disuatu negara atau daerah. Dalam kaitannya dengan investasi asing, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan demi menarik investor asing masuk kedaerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan ekonomi. Sehingga, pemerintah sebagai agent dari masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pembuat kebijakan terkait dengan investasi asing untuk melahirkan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan angka investasi asing.

Teori keagenan juga bisa terjadi ditingkat daerah, dimana agent yang dimaksud adalah pemerintah di tingkat daerah yang di beri wewenang untuk

¹⁶ Charles W.L. Hill and Thomas M. Jones, 1992, Stakeholder-Agency Theory, Journal Of Management Studies

melahirkan kebijakan bagi daerah tersebut. Dalam masalah investasi di daerah, pemerintah di daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah. Lincoln Arsyad (2000) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan angka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerah. Maka perlu kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah tersebut serta dengan adanya dukungan sumber daya yang ada dalam rangka membangun ekonomi daerah.

Dalam struktur pemerintahan di suatu negara, terdapat konsep yang bisa di pahami dalam konteks negara atau pemerintah sebagai agent atau actor. Menurut Alexander W, struktur sosial dapat di uraikan dalam tiga unsur :

a. Intersubektivitas

struktur sosial di pahami sebagai salah satu bagian dari pemahaman intersubektivitas bersama. Pemahaman terhadap suatu masalah nantinya akan memiliki pengaruh terhadap actor atau agent dalam keadaan hubungan social mereka. Apakah nantinya menghasilkan sesuatu yang positif atau negative. Dalam masalah investasi asing, diberikan pemahaman bahwa nantinya akan kah investasi asing akan memberikan efek buruk bagi pembangunan daerah atau kah

memberikan efek positif bagi pembangunan daerah. Dasar pemahaman ini kemudian akan menjadikan sebuah pengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang investasi asing.

b. Sumber daya material

Struktur social terdiri dari sumber daya material. Sumber daya material disini di definisikan sebagai sumber daya material yang nantinya akan mempengaruhi tindakan sebuah negara atau pemerintah. Maka diperlukan adanya definisi atau pemaknaan terhadap sumber daya material tersebut. Sebagai bahan sumber daya material adalah undang-undang keistimewaan Yogyakarta yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap tindakan sebuah negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing dalam menunjang peningkatan investasi asing. Dengan keterbatasan yang dimiliki Yogyakarta di bandingkan dengan daerah lain di Indonesia tidak menyebabkan Yogyakarta gagal dalam meningkatkan investasi asing. Dengan Undang-undang keistimewaan, hubungan internasional menjadi lebih luas bagi pelaksanaan kebijakan investasi asing.

c. Praktek

Struktur social sebenarnya menitik beratkan bukan pada pemikiran ataupun sumber daya material, melainkan dari perilaku actor-aktor agent tersebut. Nantinya perilaku actor dari agent-agent tersebut akan memberikan pengaruh terhadap struktur sosila tersebut, apakah mengalami penguatan atau pelemahan. Atau dengan kata lain, struktur social sebenarnya ditentukan oleh perilaku actor agent-agentr tersebut. Seperti halnya mengenai maslah otonomi daerah, apakah pemerintah daerah melakukan kewenangannya sebagai pemerintah yang otonom

atau mandiri ataukah masih mengalami control dari pemerintah pusat atau pihak lain. Ini yang kemudian menjadikan pemahaman apakah otonomi daerah tersebut berjalan atau tidak.

2. Otonomi daerah

Otonomi daerah bermakna kemandirian, dimana fenomena system pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik bergulir ke arah desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Istilah otonomi itu sendiri menurut Sidik Jatmika berasal dari bahasa Yunani yaitu “outonomos” yang berarti keputusan sendiri (self goverment) di mana di dalam istilah tersebut terkandung beberapa pengertian :

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak di control oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the right of self goverment, self determination)
3. Otonomi adalah pemerintahan sendiri, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local internal affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
4. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan hasil sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.

5. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi dominasi kekuasaan (supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Lebih jelas lagi pengertian atau definisi tentang otonomi daerah secara formal ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Hubungan diplomatic dalam kerangka interaksi transnasional dan politik antar negara dimana hubungan diplomatic yang terjalin biasanya di lakukan oleh actor negara maupun individu. Di Indonesia mengenal adanya otonomi daerah yang termaksud ke dalam undang-undang no 22 tahun 1999 pasal 7 ayat 1 dan 2. yang dapat di jelaskan dalam pola hubungan internasional yang bersifat transnasional.

3. Investasi Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negaraasing, badan usaha asing,

badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Alan M. Rugman mengungkapkan ada dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.¹⁷ Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif yang meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen (human capital). Kemudian terdapat variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut

G. HIPOTESA

Keberhasilan peningkatan angka investasi asing yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terwujud karena ;

1. Adanya sejumlah kebijakan yang mendukung kemudahan investasi asing dalam bidang :

b. Kemudahan Dalam Perizinan

¹⁷ Alan M. Rugman, *International Business: From and Environment*, (New York: Mc graw Hill Book, 1985). Hal 73-92

- c. Peluang Terhadap Investasi Asing
 - d. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Aktor yang memberikan dukungan terhadap investasi asing

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian :

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terkait dalam masalah investasi pada tahun 2008. Dengan menitik beratkan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta.

2. Lokasi Dan Jangkauan Penelitian :

Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam penataan kerjasama Internasional khususnya dalam masalah investasi asing. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2008. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Badan Kerjasama dan Penanaman Modal serta Bappeda Pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
 - 1) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 2) Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu mengadakan wawancara dengan pegawai Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dan Bappeda DIY yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui :
 - 1) Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait yang dengan investasi asing di daerah. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - 2) Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen tersebut termasuk dengan laporan realisasi investasi

asing di Yogyakarta serta undang-undang yang terkait ataupun mendukung tentang peningkatan investasi asing seperti Peraturan Gubernur Provinsi DIY nomor 58 tahun 2008 dan undang-undang NO 13 TAHUN 2012. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

4. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi berbagai aspek.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan di jelaskan menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : akan berisi tentang Investasi Asing Bagi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sub bab pertama akan membahas tentang gambaran umum tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian yang kedua akan di bahas mengenai dinamika politik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian akan dilanjutkan tentang keunggulan yang dimiliki oleh Yogyakarta. Pada sub bab terakhir akan berisi tentang manfaat investasi asing bagi daerah.

BAB III : akan membahas Dinamika investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sub bab pertama akan menjelaskan perkembangan investasi asing. Kemudian pada sub bab kedua akan hambatan dan kendala yang dimiliki dalam upaya peningkatan investasi asing.

BAB IV : Kebijakan Peningkatan Investasi Asing di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini akan membahas tentang strategi dan arah kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan evaluasi serta pengawasan dalam peningkatan investasi asing.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.